

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI*

# **BUDGET ISSUE BRIEF**

## **Kesejahteraan Rakyat**

*Vol. 02, Ed. 08, Mei 2022*

**Dukungan Pemerintah Bagi  
UMKM Perempuan Demi  
Pembangunan Ekonomi  
Nasional** Hal. 1

**Peninjauan Masa Berlaku  
Vaksin COVID-19** Hal. 3

**Potensi *Wellness Tourism* di  
Indonesia** Hal. 5



## **Daftar Isi**

Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Perempuan Demi Pembangunan Ekonomi Nasional..	1
Peninjauan Masa Berlaku Vaksin COVID-19.....	3
Potensi <i>Wellness Tourism</i> di Indonesia.....	5

## **Dewan Redaksi**

### **Penanggung Jawab**

Drs. Helmizar, M.E.

### **Pemimpin Redaksi**

Slamet Widodo

### **Redaktur**

Marihot Nasution \* Martha Carolina

Savitri Wulandari \* Mutiara Shinta Andini

### **Editor**

Marihot Nasution

### **Sekretariat**

Husnul Latifah \* Musbiyatun

Kiki Zakiah \* Hilda Piska Randini

*Budget Issue Brief* Kesejahteraan Rakyat ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

## Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Perempuan Demi Pembangunan Ekonomi Nasional

### HIGHLIGHTS

- Hasil survei Bank Dunia menunjukkan bahwa 42,8 persen UMKM dimiliki oleh perempuan. Namun demikian, pandemi Covid-19 juga berimbas pada sektor UMKM yang dimiliki perempuan.
- Peran pemerintah dalam ikut serta meningkatkan UMKM perempuan yaitu dibuatnya program Industri Rumahan (IR). Program IR ini memiliki target 3.764 pelaku usaha di 21 kabupaten/kota dalam 16 provinsi.
- Untuk tahun 2019, anggaran program IR ini digunakan untuk pelaksanaan lokakarya, fasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis kebutuhan lokal, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan industri rumahan, pemutakhiran data pelaku industri rumahan, dan fasilitasi promosi.

Kewirausahaan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipandang penting karena dapat mendorong jumlah pelaku usaha dan menyerap tenaga kerja baru. Data yang diperoleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2018 mencatat bahwa UMKM sanggup menyerap tenaga kerja hingga 97 persen, dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 persen, lebih besar dibandingkan dengan kontribusi skala usaha besar.

**Tabel 1. Kontribusi UMKM dalam PDB 2016-2018 (dalam persen)**

Unit Usaha	2016	2017	2018
UMKM	59.84	60.90	61.07
- Mikro	36.65	37.59	37.59
- Kecil	9.63	9.61	9.60
- Menengah	13.57	13.69	13.70
Besar	40.16	39.10	38.93

Sumber: TNP2K, 2021

Partisipasi perempuan di sektor UMKM juga cukup tinggi. Meski data terpilah berdasarkan gender belum tersedia untuk UMKM, hasil survei Bank Dunia menunjukkan bahwa 42,8 persen UMKM dimiliki oleh perempuan. Namun demikian, pandemi Covid-19 juga berimbas pada sektor UMKM yang dimiliki perempuan. Hasil penelitian Prakarsa pada November 2020 mengenai dampak Covid-19 terhadap UMKM perempuan menunjukkan bahwa 96 persen mengalami penurunan omset, 67 persen mengalami kendala pemasaran produk, 51 persen mengalami kesulitan akses modal dan 35 persen kesulitan memperoleh bahan baku. Kondisi ini mendorong perlunya peran pemerintah dalam memajukan UMKM perempuan.

Salah satu peran pemerintah dalam ikut serta meningkatkan UMKM perempuan yaitu dibuatnya program Industri Rumahan (IR). Program Industri Rumahan adalah program yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). KPPPA berandil pada mengembangkan industri rumahan karena sebagian besar pelaku usaha industri ini adalah perempuan, kelompok yang diayomi KPPPA. Perempuan perlu mendapat dukungan agar dapat meningkatkan kemampuan dan nilai tambah atas pekerjaannya, sehingga mereka berpeluang memajukan dan mengembangkan dirinya. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud industri rumahan adalah suatu industri berskala mikro yang memanfaatkan dan/atau mampu menghasilkan produk berupa barang jadi yang bernilai tambah dan beroperasi di rumah, baik secara khusus maupun secara paruh waktu.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal  
DPR RI

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha  
Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri  
Wulandari

#### Penulis

Mutiara Shinta Andini · Arjun Rizky  
Mahendra Nazhid

Program IR berlandaskan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan dalam Membangkitkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan, yang merupakan dasar untuk implementasi program perluasan industri rumahan untuk 3.764 pelaku usaha di 21 kabupaten/kota dalam 16 provinsi sebagai indikator keberhasilan program. Program ini dikatakan berhasil jika terjadi pendapatan perempuan dan anggota keluarga meningkat dari hasil usahanya, serta jumlah perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai buruh migran berkurang.

Dalam kurun waktu 2016-2018 diketahui terdapat capaian positif atas program IR yang ditunjukkan dengan tingkat kenaikan level usaha pelaku IR. Informasi dari Renstra KPPPA 2020-2024 menyatakan bahwa pelaku IR yang dilibatkan dalam program ini dari tahun 2016-2018 tercatat sebanyak 6.827 pelaku IR di 21 daerah. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah dan kenaikan level usaha IR yang tercatat adalah di 2016 sebanyak IR level 1 berjumlah 344 pelaku menjadi 224 pelaku di 2018, IR level 2 berjumlah 1.171 pelaku di 2016 dan di 2018 menjadi 2.180 pelaku. Sementara itu, IR level 3 berjumlah 87 pelaku di 2016 menjadi 324 pelaku di tahun 2018. Program IR ini dilaksanakan mulai tahun 2016 hingga 2019 dengan anggaran dan sasaran pelaku IR yang terdapat pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2. Anggaran Fasilitas Industri Rumahan 2016-2019**

Tahun	Jumlah pelaku IR yang dipetakan	Anggaran	Jumlah pelaku IR yang difasilitasi APBN
2016	2.965	Rp10.165.540.000	2.100
2017	3.286	Rp3.149.930.000	1.247
2018	NA	Rp11.338.731.000	NA
2019	3.764	Rp5.360.000.000	NA

Sumber: TNP2K, 2021

Sebagai gambaran penggunaan anggaran program IR ini, pada 2018, anggaran program IR mencapai Rp11.338.731.000 ini ditujukan untuk kegiatan pemutakhiran data pelaku industri rumahan, pelatihan bagi pelaku industri rumahan di tujuh kabupaten/ kota, *training of trainers* (ToT) produktivitas pelaku IR menggunakan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas pendamping lokal, fasilitas promosi, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IR. Adapun untuk tahun 2019, anggaran yang disediakan mencapai Rp5.360.000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan lokakarya, fasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis kebutuhan lokal, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan industri rumahan, pemutakhiran data pelaku industri rumahan, dan fasilitasi promosi.

Semasa pandemi, KPPPA melakukan survei pelaku industri rumahan terhadap dampak Covid-19 untuk menelusuri implementasi dan pengembangan industri rumahan pada masa pandemi. Sejumlah poin penting yang didapatkan dari survei tersebut, mencakup 1) dari aspek penghasilan, terjadi penurunan penghasilan per hari pelaku industri rumahan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka pelaku usaha IR yang memiliki penghasilan rendah (< Rp200.000). 2) dari aspek utang usaha menunjukkan a) sebanyak 1.229 pelaku industri rumahan (59,3 persen) memiliki utang/pinjaman; b) jenis usaha yang paling banyak adalah olahan makanan, didominasi oleh 1.794 pelaku industri rumahan (87 persen). 3) Dari aspek usaha, sebanyak 95,18 persen mengalami penurunan angka penjualan dan 91,85 persen mengeluhkan adanya kenaikan harga bahan baku produksi.

Pada dasarnya program yang sudah ada untuk memberdayakan perempuan, khususnya dalam UMKM, sangat membantu dari sisi ekonomi dan memiliki kontribusi bagi perekonomian nasional, karena itu program IR ataupun program serupa patut dipertahankan keberlangsungannya. Meskipun demikian, pengembangan program yang memiliki tujuan dan sasaran serupa yaitu pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi memiliki beberapa tantangan antara lain 1) perlunya membangun sinergi antar kementerian/lembaga yang memiliki program pemberdayaan ekonomi perempuan, 2) meningkatkan anggaran program untuk keberlangsungan jalannya UMKM perempuan, dan 3) memperkuat peran pendamping pelaku usaha perempuan.

# Peninjauan Masa Berlaku Vaksin COVID-19

## HIGHLIGHTS

- Terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan dalam memastikan mutu dan kualitas vaksin COVID-19 agar memenuhi syarat, yaitu dari pengujian kualitas, pengujian keamanan, pengujian efikasi, dan pengujian stabilitas.
- Setiap vaksin memiliki masa simpan (*shelf-life*) dan masa kadaluwarsa (*expired date*), untuk itu masyarakat dan pemerintah harus cermat dalam pengujian vaksin agar tetap terjamin mutunya meski ada perpanjangan waktu simpan.
- Vaksin COVID-19 merupakan vaksin yang diproduksi karena kedaruratan dan harus sesegera mungkin didistribusikan untuk diberikan ke masyarakat, maka tanggal kadaluwarsa vaksin ini diperpendek tetapi masih diberi maksimal 2 kali kesempatan untuk diuji klinis melalui uji stabilitas yang dilakukan oleh produsen.

Sejak 13 Januari 2021, pemerintah berupaya mengimunisasi seluruh masyarakat Indonesia melalui vaksinasi, tujuannya untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penularan penyakit yang disebabkan virus *Coronavirus Disease* (COVID-19). Per tanggal 15 Mei 2022, dari 208.265.720 penduduk Indonesia, sudah 95,84 persen divaksinasi dosis ke-1, 79,83 persen dosis ke-2, dan baru 20,49 persen divaksinasi dosis ke-3.

Agar mencapai target vaksinasi COVID-19 yang ditetapkan, dalam perencanaan, distribusi, dan penentuan vaksin COVID-19, termasuk pemenuhan standar keamanan dan mutu vaksin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerjasama dengan para ahli di bidang farmakologi, imunologi, klinisi, apoteker, ahli epidemiologi, ahli virologi, dan staf biomedis yang telah menjadi Tim Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin COVID-19, Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin), dan *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI). Dan terdapat 4 aspek pengujian klinis untuk memastikan mutu vaksin, yaitu uji kualitas (*quality*), uji keamanan (*safety*), uji efikasi (*efficacy*), dan uji stabilitas (*stability*).

Untuk menangani pandemi COVID-19 pemerintah telah melakukan pengadaan vaksin melalui skema *Business to Business* (B2B) dan Covax Gavi/Hibah, dengan jumlah vaksin sebagai berikut:

### Pengadaan Vaksin COVID-19 Skema B2B & Hibah Per 8 April 2022

Jenis Vaksin	Diterima	Terdistribusi	Stok
<b>Pengadaan Vaksin Skema B2B</b>			
Coronavac	124.600.000	124.459.160	140.840
Covid Bio Farma	125.335.100	125.335.100	-
AstraZeneca	50.014.340	28.147.080	21.867.260
Covovax	9.000.000	6.220.200	2.779.800
Sub Total	308.949.440	284.161.540	24.787.900
<b>Pengadaan Vaksin Skema Covax Gavi atau Hibah</b>			
AstraZeneca	54.541.934	32.686.964	21.854.970
Pfizer	32.076.780	19.659.228	12.417.552
Moderna	25.060.814	13.689.284	11.371.530
Coronavac	17.007.976	17.007.976	-
Sinopharm	949.502	949.502	-
Janssen	824.000	624.800	199.200
Sub Total	130.461.006	84.617.754	45.843.252
Total	439.410.446	368.779.294	70.631.152

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2022

BPOM sebagai regulator obat Indonesia berkoordinasi dengan Tim Penilai Vaksin COVID-19 terkait vaksin B2B dan hibah serta

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal  
DPR RI

Penanggung Jawab  
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur:  
Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis  
Marihot Nasution · Firly Nur Agustiani

menerbitkan *Emergency Use Authorization* (EUA) karena vaksin ini merupakan vaksin yang dibuat dalam kondisi darurat dan perlu diinjeksikan segera. Namun demikian, perlu diperhatikan tanggal masa simpan (*shelf-life*) dan tanggal kadaluwarsanya (*expired date*). Dalam menetapkan *shelf-life* BPOM menggunakan standar pengendalian mutu melalui uji stabilitas. Pengujian stabilitas tersebut adalah serangkaian pengujian yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi stabilitas untuk menentukan umur *shelf-life* vaksin dalam kondisi pengemasan dan penyimpanan yang telah ditentukan. dan vaksin yang ditetapkan dalam kondisi darurat (EUA) rata-rata memiliki *shelf-life* selama 6 bulan. Vaksin COVID-19 yang telah mendapat persetujuan *shelf-life* di Indonesia terdiri dari: (i) vaksin COVID-19 Bio Farma selama 12 bulan; (ii) *bets* tertentu vaksin COVID-19 AstraZeneca yang diproduksi oleh Catalent Anagni S.R.L., Italia selama 9 bulan; (iii) kemasan 1 dosis *prefilled syringe* vaksin COVID-19 Sinopharm selama 12 bulan; (iv) Pfizer-Biontech COVID-19 *Vaccine (Comirnaty)* dengan tempat/site produksi di Pfizer Manufacturing Belgium, Puurs, Baxter selama 9 bulan; (v) kemasan 2 dosis (vial) vaksin COVID-19 Sinopharm selama 11 bulan; (vi) Vaxzevria (AstraZeneca) dengan tempat/site produksi di Siam BioScience Co. Ltd., Thailand; CP Pharmaceuticals Ltd., UK; dan Seqirus Pty.Ltd., Australia selama 9 bulan; dan (vii) CoronaVac *vial @ 1* dosis selama 12 bulan.

Untuk menjamin mutu vaksin, penting juga memperhatikan tanggal kadaluwarsa, karena tanggal kadaluwarsa ini menentukan stabilitas dan kualitas vaksin, jika vaksin disimpan dalam kondisi penyimpanan yang tertera pada kemasan khususnya pada suhu yang tertera pada kemasan, mengacu pada Farmakope Indonesia kemungkinan besar vaksin akan aman saat digunakan meskipun telah melewati tanggal kadaluwarsa. Stok jumlah vaksin COVID-19 di Bio Farma yang sudah kadaluwarsa per 25 Maret 2022 sebanyak 19.323.300 dosis terdiri dari 18.683.300 dosis dengan pengadaan skema hibah (AstraZeneca 17.132.360 dosis, Moderna 1.549.770 dosis, dan Pfizer 1.170 dosis), dan 640.000 dosis dengan pengadaan skema B2B (AstraZeneca). Adapun vaksin yang akan kadaluwarsa bulan April 2022 sebanyak 1.531.370 dosis (AstraZeneca 1.095.000 dosis dan Moderna 436.370 dosis).

Vaksin yang digunakan di Indonesia berasal dari hibah dan pembelian dari produsen yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Vaksin yang berasal dari hibah memiliki masa kadaluwarsa yang sangat singkat, dan ada beberapa negara yang akan menghibahkan vaksin ditolak karena masa kadaluwarsanya akan segera habis. Penolakan ini karena dikhawatirkan saat didistribusikan ke daerah vaksin tersebut sudah habis masa berlakunya. Untuk vaksin yang dibeli, sebenarnya masa kadaluwarsanya maksimal sampai 3 tahun, tetapi karena vaksin COVID-19 adalah vaksin yang harus segera diberikan kepada masyarakat, maka tanggal kadaluwarsa yang tertera pada vial vaksin dimajukan. Dengan tujuan percepatan vaksinasi dan meskipun sudah melalui tanggal kadaluwarsa yang tertera pada vial, vaksin ini masih dapat dilakukan uji klinis melalui uji stabilitas. Uji stabilitas dapat dilakukan hingga 2 kali pengujian per vaksin, jika setelah lolos uji tersebut, lalu produsen menyatakan vaksin masih memenuhi syarat, dan BPOM juga menyetujuinya. Maka BPOM mengeluarkan izin (EUA) vaksin untuk diedarkan kembali dan disuntikkan ke masyarakat.

Dimajukannya tanggal kadaluwarsa pada vial vaksin COVID-19 menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat. Kota Malang, Jawa Timur merupakan daerah yang akan menggunakan vaksin kadaluwarsa untuk vaksin dosis ke 3. Sekitar 2.500 vial vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca yang telah kadaluwarsa sejak 28 Februari 2022, diberikan kepada masyarakat di melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), vaksin kadaluwarsa masih bisa digunakan hingga 1 bulan berikutnya, tetapi prosedurnya vaksin kadaluwarsa harus dikembalikan ke produsen untuk dilakukan pengujian stabilitas. Jika setelah vaksin diuji secara klinis, dan produsen menyatakan vaksin tersebut masih memenuhi persyaratan, maka BPOM menyetujui vaksin yang telah diuji tersebut untuk didistribusikan kembali dan diterbitkan EUA.

Untuk menjawab perbedaan persepsi tersebut, DPR harus mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dan Kemenkes melakukan pengawasan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Faskes dalam penyaluran dan pelaksanaan vaksin COVID-19 serta melakukan sosialisasi terkait tanggal kadaluwarsa. Selain itu diperlukan perencanaan yang matang terkait jumlah dan waktu distribusi vaksin, agar vaksin habis sebelum tanggal kadaluwarsa.

# Potensi *Wellness Tourism* di Indonesia

## HIGHLIGHTS

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2021) mencatat bahwa tahun 2020 terjadi penurunan kedatangan wisatawan asing sebesar 75,03 persen, penurunan kedatangan wisatawan nusantara sebesar 29,93 persen, penurunan jumlah pertukaran mata uang asing sebesar 80,82 persen serta penurunan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata sebesar 6,67 persen.
- Dalam laporan *Global Wellness Tourism Economy* (2018) mencatat bahwa tren global perkembangan *wellness tourism* meningkat pesat dimana tumbuh sebesar 6,5 persen dari tahun 2015-2017.
- GWI (2018) mencatat bahwa Indonesia masuk ke dalam 20 destinasi *wellness tourism* terbaik pada tingkat global.

Pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2021), mencatat bahwa tahun 2020 terjadi penurunan kedatangan wisatawan asing sebesar 75,03 persen, penurunan kedatangan wisatawan nusantara sebesar 29,93 persen, penurunan jumlah pertukaran mata uang asing sebesar 80,82 persen serta penurunan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata sebesar 6,67 persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah guna meredam penyebaran pandemi ini.

Namun, pandemi yang terjadi saat ini justru mengubah banyak pola kehidupan masyarakat termasuk pada pola perilaku masyarakat dalam berwisata. Dalam tinjauan tren industri pariwisata Kemenparekraf (2021) mencatat bahwa pandemi Covid-19 membuat masyarakat lebih mementingkan aspek kesehatan dan keamanan dalam berwisata. Terdapat empat karakteristik ekonomi pariwisata baru yang akan muncul yaitu: *hygine, low-touch, less-crowd* dan *low mobility*. Salah satu bentuk wisata yang berpotensi mengalami tren peningkatan adalah *wellness tourism* (wisata kebugaran). Hal ini disebabkan oleh kecemasan dan ketakutan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga masyarakat lebih memilih wisata yang mempertimbangkan *mindfulness*.

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2012), *wellness tourism* merupakan bagian dari *health tourism* yang dikembangkan untuk tujuan pencegahan, pengobatan maupun pemeliharaan yang dilengkapi dengan fasilitas dan layanan yang mendukung terwujudnya pengalaman berwisata yang berkualitas. Dalam laporan *Global Wellness Tourism Economy* (2018) mencatat bahwa perkembangan tren global *wellness tourism* meningkat pesat dimana tumbuh sebesar 6,5 persen dari tahun 2015-2017. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari meningkatnya peningkatan jumlah turis yang melakukan kegiatan ini yaitu pada tahun 2015 terdapat 139 juta perjalanan *wellness tourism* meningkat menjadi 830 juta perjalanan pada tahun 2017.

*Global Wellness Institute* (GWI) menyatakan bahwa terdapat beberapa nilai holistik yang mendorong para wisatawan dalam memilih dan mendorong aktivitas *wellness tourism* yaitu kegiatan fisik, mental, sosial, spiritual, lingkungan dan emosional. Setiap destinasi memiliki karakteristik sendiri yang berkaitan *wellness tourism* seperti budaya lokal, alam, tradisi kuliner, tradisi spiritual, sejarah, tempat spa, aktivitas fisik serta hal unik lainnya (lihat gambar).

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal  
DPR RI

**Penanggung Jawab**  
Drs. Helmizar, M.E.

**Redaktur:**  
Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha  
Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri  
Wulandari

**Penulis**  
Savitri Wulandari · Ollani Vabiola Bangun

## Nilai Holistik yang Mendorong Aktivitas dan Pilihan Dalam *Wellness Tourism*



Sumber: Global Wellness Institute, 2018

di tahun 2017. Jumlah industri spa di Indonesia sebesar 2.692 industri dengan total pendapatan USD1.089 juta dan menyerap tenaga kerja sebesar 77.309 orang. Selain itu, Indonesia masuk pada 18 (delapan belas) destinasi wisata mata air panas/mineral terbaik di Asia Pasifik dengan jumlah total 46 sumber mata air dengan total pendapatan sebesar USD22,9 juta. Dari berbagai catatan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa Indonesia berpotensi besar dalam pengembangan *wellness tourism*. Hal ini dikarenakan beraneka ragam budaya, keindahan alam, dan tradisi warisan leluhur yang kaya serta unik ada di Indonesia sehingga dapat memenuhi karakteristik yang dibutuhkan dalam pengembangan *wellness tourism*. Semakin berkembangnya tren *wellness tourism* akan membuat produk-produk kebutuhan terhadap *wellness tourism* akan terus berkembang. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi Indonesia untuk terus menggali potensi wisata ini.

Untuk mengembangkan *wellness tourism*, pemerintah Indonesia melalui Kemenparekraf dan Kemenkes telah membentuk Gerakan Terpadu *Indonesian Wellness dan Healthcare Tourism Movement* (IWHM) yang telah dimulai sejak tahun 2012 serta *MoU* wisata kesehatan pada tahun 2017. Dalam upaya memaksimalkan potensi *wellness tourism*, Kemenparekraf menjadikan kota Solo, Yogyakarta dan Bali sebagai *pilot project* pengembangan *wellness tourism* sebagai momentum pemulihan sektor pariwisata pada tahun 2022. Dalam mengembangkan potensi tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut antara lain: *pertama*, seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat dan daerah, para pelaku di industri pariwisata, dan masyarakat bersinergi. *Kedua*, penting bagi pemerintah untuk mengubah paradigma masyarakat yang sering memandang negatif industri spa melalui standarisasi dan pengelolaan industri spa yang baik. *Ketiga*, melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai sumber daya utama dalam mengelola potensi sehingga memiliki keahlian khusus pada bidang *wellness tourism* (misalnya: keahlian yoga dan spa). *Keempat*, tetap menjaga protokol kesehatan yang sesuai standart *Cleanliness, Health, Safety* dan *Environment* (CHSE) serta mengembangkan potensi *wellness tourism* di banyak daerah dengan membuat pemetaan potensi-potensi unik yang dimiliki tiap daerah.

GW (2018) mencatat bahwa Indonesia masuk ke dalam 20 (dua puluh) destinasi *wellness tourism* terbaik pada tingkat global. Indonesia berada pada posisi ke 17 dari 20 negara dengan total kunjungan sebesar 8,3 juta kunjungan dimana total pengeluaran wisatawan mencapai USD 6,9 juta serta menyerap sebesar 1,31 juta pekerja pada bidang ini. Selanjutnya, rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan *wellness tourism* di Indonesia sebesar 20,6 persen dari tahun 2015-2017. GW pada tahun yang sama menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki situs web pariwisata nasional yang resmi dalam mempromosikan *wellness tourism* tetapi belum memiliki arah dan strategi kebijakan dalam mengembangkan *wellness tourism* serta belum menjadi target investasi nasional.

Indonesia juga memiliki industri spa yang potensial. Dalam laporan *Asian Development Bank* (2018) disebutkan bahwa Indonesia berada pada 20 (dua puluh) industri spa terbaik di asia pasifik